



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN KEPALA BMKG**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. 16.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
bulan Mei 2023
2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI
Semester I Tahun 2022
3. Pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024
4. Lain-lain
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
17 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
2 dari 12 orang Anggota
1. Ir. Sudjadi
2. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
2 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Cen Sui Lan
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
0 dari 7 orang Anggota
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. Drs. H. Soehartono, M.Si.

4. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
1 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.AP.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Lasmi Indaryani, S.E.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
0 dari 4 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Kepala BMKG (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI / F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para Anggota komisi V DPRI RI,

Yang saya hormati Ibu Kepala Badan BMKG Ibu Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Bu ya,

Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama dan beserta para Deputi, beserta seluruh jajarannya,

Hadirin, hadirat yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara-acara rapat kita pada hari ini.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI, saat ini rapat di Komisi V diikuti oleh sekitar 25 orang Anggota, Fraksi 9 Fraksi, artinya bahwa rapat ini sudah kuorum, maka rapat ini bisa kita buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.40)

Terima kasih, kami sampaikan kepada Ibu Kepala BMKG beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

Hasil pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2022, dan pembicaraan pendahuluan RKA/KL dan rencana kerja pemerintah tahun 2024, dan yang lain-lainnya.

**Pimpinan,
Pimpinan,
Anggota Komisi V,
Kepala BMKG yang kami hormati.**

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024 dan RKP TA 2024 bersama dengan Kementerian Lembaga Mitra Kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran BMKG per 31 Mei 2023 adalah sebesar 25,69%, untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kepala BMKG tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, terkait agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2022 kami memberikan apresiasi kepada Kepala BMKG atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun demikian masih terdapat sebelas temuan dan 27 rekomendasi yang terdiri dari sembilan temuan terkait belanja barang atau jasa dan dua temuan terkait aset dengan indikasi kerugian negara sebesar 7,9 Miliar. Ini hanya indikasi Bu ya, nanti bisa dijelaskan dan dari temuan tersebut yang memberikan kerugian cukup besar antara lain sebagai berikut:

Satu, keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Terminal *Doppler Weather Radar* atau TDWR beserta *Tower* dan *Lidar Windshear* di Bandara Yogyakarta belum dikenakan denda.

Yang kedua, realisasi belanja modal atas pembangunan Terminal *Doppler Weather Radar* atau TDWR serta *Tower* dan *Lidar Windshear* di Bandara Sultan Hasanuddin International Airport Makassar belum memenuhi spesifikasi teknis dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, belum dikenakan denda keterlambatan.

Ketiga, kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan peralatan observasi, analisis, dan *forecasting* untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan belum tersedia secara memadai.

Keempat, kegiatan pemeliharaan dan penggantian suku cadang tidak sesuai kebutuhan.

Agenda berikutnya yang akan kita bahas adalah pada rapat kerja ini adalah rencana kerja pemerintah pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2024, dalam hal ini pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, Pagu indikatif BMKG tahun 2024 adalah sebesar 1,5 Triliun harapan kita ini bisa bertambah Bu, karena ini kan masih Pagu Indikatif, Pagu Indikatif, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen dan program meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari BMKG antara lain sebagai berikut,

Yang pertama, dalam rangka mendukung mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema RKP tahun 2024 Komisi V meminta BMKG agar belanja badan tahun 2024 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat terhadap akses informasi yang akurat.

Yang kedua, meningkatkan sistem dan respon peringatan dini dengan didukung peningkatan kapasitas serta koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana.

Yang ketiga, meminta penjelasan berkaitan strategi yang akan ditempuh BMKG untuk mencapai target tersebut di tahun 2024.

Keempat, kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi menuju BMKG berkelas dunia.

Kelima, organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan strategis.

Keenam, kebutuhan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kepada BMKG beserta jajarannya agar dalam proses penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2024 dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kepala Badan untuk memberikan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 sampai dengan bulan Mei, Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022, dan Pembicaraan Pendahuluan RKA/KL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Kami persilakan Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih.

Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI.

Perkenankan kami menyampaikan salam lebih dahulu.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI, beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak rekan dari BMKG, Serta hadirin sekalian yang hadir pada acara rapat dengar pendapat ini.

Perkenankan kami menyampaikan yang pertama lebih dahulu yaitu evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, dan nanti dilanjutkan dengan laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 serta pendahuluan RKA KL dan rencana kerja pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Mohon izin, langsung ke *slide* nomor 4.

Mohon izin kami sampaikan perkembangan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2023. Jadi, Pagu awal yang tercatat adalah 3.010.572.747.000 yang terdiri dari belanja pegawai sekitar 750, 750 Miliar, kemudian belanja barang sekitar 1,3 Triliun, dan belanja modal sekitar 956 Miliar.

Namun kemudian, Pagu akhir menjadi 3,276 atau 3,3 Triliun 276 miliar 750 juta 231 ribu dengan rincian belanja pegawai tetap 700 sekitar 750 Miliar,

belanja barang ini ada perubahan malah menurun menjadi 1,3 Triliun, namun belanja modal menjadi meningkat yaitu 1,2 Triliun karena ada luncturan.

Mohon maaf, belanja barang justru meningkat juga, mohon maaf belanja barang dan belanja modal meningkat karena adanya luncturan pinjaman luar negeri untuk belanja barang sebesar 3,8 Miliar dan untuk belanja modal sebesar 118,373 miliar plus rekonposisi SBSN sebesar 143,9 kurang lebih koma 9 Miliar.

Dan kemudian setelah ada peningkatan Pagu Akhir kami juga masih apa ada blokir anggaran yang belum dapat dipakai yaitu blokir akibat adanya, adanya pinjaman luar negeri dari Finlandia yang belum ada register dan kegiatan aplikasinya, belum ada *clearance*, kemudian juga akibat adanya *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan.

Nah, untuk *non automatic adjustment* blokirnya sebesar 2,1 Miliar kurang lebihnya dan untuk *automatic adjustment* sebesar 188,1 Miliar sehingga total blokir sebesar 190 Miliar kurang lebihnya dan Pagu setelah dikurangi blokir menjadi 3 Triliun kurang lebihnya atau 3.086.497.091.000.

Nah, bagaimana realisasi anggaran tersebut hingga 31 Mei adalah sebesar 25,69%, kalau dihitung terhadap Pagu non blokir, *nah*, sudah dikurangi blokir maksudnya, nah itu terdiri dari belanja pegawai realisasi sebesar 40,6% atau 282,9 Miliar, belanja barang sebesar 22,93% atau sebesar 286,53 Miliar dan belanja modal sebesar 19,57% atau 223,32 Miliar.

Bagaimana capaian tersebut apabila disandingkan dengan target ini mohon maaf terlihat bahwa capaian belum sesuai target yang 34,84%, capaian baru mencapai 25,69% meskipun progres atau kemajuan fisik sudah sangat mendekati target yaitu 34,06% dengan target 34,8%.

Nah, kenapa demikian, ini adalah akibat adanya apa proses administrasi yang belum tuntas, jadi sudah dibelanjakan namun apa ya sistem pelaporan administrasinya belum tuntas sehingga belum tercatat sebagai alokasi yang terbelanjakan.

Kemudian realisasi anggaran ini apabila kita lihat dari grafik ini, atau kita *slide* berikutnya.

Nah, di sini terlihat untuk rupiah murni ini memang yang tercapai lebih paling besar adalah belanja pegawai, kemudian disusul belanja barang, dan belanja modal. PLN ini belanja barangnya masih rendah, belanja modalnya sudah apa, sudah cukup maju, *nah*, dan seterusnya juga untuk PNBPN ini apa terutama di sini belanja barang sudah mencapai 32%, belanja modal baru 28,9%, dan untuk SBSN serapan baru mencapai 19%.

Nah, penyebabnya jadi tadi saya catat sidang atau Pimpinan Dewan meminta adanya penjelasan kenapa itu rendah dan bagaimana upaya-upaya

untuk mengatasi tadi yang keterlambatan dalam administrasi pencatatan alokasi yang sudah dibelanjakan.

Nah, sebelum menjelaskan upaya, izin kami sampaikan beberapa penyebab rendahnya realisasi, yang pertama tadi terkait dengan beberapa kegiatan dari pinjaman luar negeri masih ada dalam proses lelang jadi belum kontrak, terutama kegiatan IDRIP yaitu kegiatan yang didanai oleh Bank Dunia untuk penguatan sistem peringatan dini ini terdapat penyesuaian spesifikasi teknis, ada perubahan karena kami mendapat masukan juga dari TAC itu singkatan apa.

Jadi konsul, *Technical Assistance committee*, jadi ada komite yang mengawal yang memberikan *advice*, jadi komite di luar BMKG memberikan *advice* agar teknologi yang dipasang itu benar-benar teknologi yang, yang tepat dan terkini bukan ketinggalan.

Nah, ada masukan-masukan sehingga kami melakukan penyesuaian spesifikasi teknis sesuai kebutuhan teknologi terkini dan juga harus mengakomodir peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, *nah*, ini peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ini sangat penting.

Kemudian juga *loan* ini terdiri dari banyak paket, paket kegiatan yang harus dilelang dan dalam *project* ini memiliki aturan pelaksanaan yang berbeda-beda sehingga kami membutuhkan tambahan waktu untuk pembelajaran dan pemahaman aturan tersebut termasuk membutuhkan konfirmasi dan konsultasi terhadap *lender*.

Karena setiap kita melakukan langkah, selesai harus mendapatkan *no objection letter* atau persetujuan dari pihak *lender* dan untuk menunggu itu perlu waktu sampai seminggu lebih ya, ya jadi bahkan kadang-kadang beberapa minggu lebih ya baik.

Dan yang kedua adalah kegiatan pinjaman luar negeri untuk modernisasi, observasi, dan prediksi kondisi cuaca maritim yang disingkat di sini STR-2.

Nah, ini juga terdiri dari beberapa paket kegiatan, ada tiga paket, nah yang masih jadi masalah adalah paket yang MMS-2 secara tertulis belum disepakati jumlah paket kegiatan di dalam MMS-2 ini untuk pengadaan barang dan jasa, meskipun secara lisan itu sudah ada kesepakatan ada tiga paket lagi di dalam satu paket itu akhirnya ada tiga paket lagi secara lisan sudah disepakati tapi tidak bisa dieksekusi karena kita menunggu persetujuan hitam di atas putih atau *no objection letter* nya.

Nah, ini juga sudah berapa lama kita nunggu, mungkin satu bulan, oh dua minggu, oke.

Kemudian yang kedua pekerjaan yang sudah berjalan yaitu SUS dan MMS 1, ini pekerjaannya sudah berjalan sesuai rencana termin pembayaran modal baru bisa dibayarkan pada *quarter* yang kedua dan *quarter* yang ketiga.

Jadi bulan Mei itu memang belum saatnya membayar dan juga menyesuaikan progresnya yang sebetulnya juga sesuai dengan jadwal setelah Juni ya, setelah Juni.

Kemudian penyebab yang kedua adalah kegiatan SBSN, ini karena kontraknya ternyata di bawah Pagu sehingga ada Silpa, maka ini kami menunggu persetujuan Bappenas untuk penggunaan kembali Silpa, ini sudah kita proses beberapa waktu tapi juga belum, belum ada hasilnya.

dan yang ketiga adalah kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah, yaitu karena di daerah tampaknya ada keterbatasan jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi PPJ dan ini sudah ada solusi kami pandu, dan ada pelatihan ada apa *training* yang dengan sertifikat, tapi itu mengakibatkan mundur juga, dan kebijakan yang kedua penyebabnya adalah kebijakan pelimpahan kegiatan ke daerah baru terealisasi di Triwulan II, sehingga masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, jadi saat ini masih dalam proses belum ada anggaran yang dicairkan.

Yang keempat, penyebab realisasi rendah adalah mekanisme pengadaan alat operasional utama atau Aloptama dan suku cadang melalui e-Katalog masih terkendala untuk di daerah, untuk dilaksanakan di daerah seperti dalam hal biaya distribusi, klaim garansi, atau kerusakan dan lain sebagainya.

Kemudian langkah strategis percepatan apa yang kami lakukan, yang pertama adalah melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang dibiayai pinjaman luar negeri karena prosesnya relatif jauh lebih panjang ya, untuk lelang saja harus enam bulan ya Pak ya, jadi separuh tahun sendiri untuk lelang itu sesuai aturan untuk pengadaan dengan, dengan internasional.

Nah, lalu strateginya untuk kegiatan IDRIP adalah melakukan percepatan penyelesaian spek untuk segera disampaikan kembali, tadi ada perubahan spek disampaikan kembali ke Bank Dunia agar diberikan *no objection letter* atau nol, serta melakukan percepatan pengadaan untuk paket-paket yang sudah mendapatkan *no objection letter* dari Bank Dunia, jadi sudah ada dari sekian paket ini sudah ada yang bisa dieksekusi ini kami percepat juga prosesnya.

Lalu untuk kegiatan STR-2 ini juga dari luar negeri dari Prancis, ini kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak *lender* sudah dilakukan terjadi kesepakatan jumlah paket namun itu tadi belum ada tertulisnya dan ini sedang kami *push*, apa kami minta untuk segera diberikan persetujuan tertulis atau *no objection letter*.

Langkah strategi yang kedua terkait pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai dengan 200 Juta, jadi yang sifatnya sekaligus dan nilainya

sampai dengan 200 Juta Rupiah kami paksa harus selesai pada semester I Tahun Anggaran 2023, jadi paling lambat bulan Juni ini dan kami memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat triwulan 3 tahun anggaran 2023 yaitu September ya.

Kemudian yang ketiga untuk peningkatan kapasitas SDM di daerah itu kami lakukan *training* kursus bersertifikat berkoordinasi dengan Satker atau instansi yang telah memiliki Tim Pokja, jadi kami juga mem-BKO-kan apa ya, SDM yang sudah siap ke daerah yang belum siap.

Lalu pendampingan, dilakukan pula pendampingan pusat secara intensif juga kami lakukan kegiatan swakelola sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dan kami percepat penetapan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan TKDN, dan yang terakhir tetap melakukan koordinasi dan kerja sama terus dengan LKPP, KPK, BPKP, Kejaksaan, dan Perguruan Tinggi serta aktif melaksanakan terobosan untuk pengadaan barang dan jasa agar lebih *clear, clean, dan qualified* serta tepat waktu.

Demikian yang penjelasannya, izin kami lanjutkan untuk laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester Tahun, Semester I Tahun 2022.

Jadi tadi terima kasih sudah apa, mendapatkan apresiasi dan dukungan, arahan, sehingga dengan bimbingan DPR Komisi V ini kami selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, namun hasil pemantauan semester I Tahun 2022 atas 22 laporan hasil pemeriksaan terdapat 226 temuan senilai total 205.704.107.278,52 Rupiah, serta mendapat 482 rekomendasi senilai 178.125.005.189,57 yang status tindak lanjutnya adalah sebagai berikut.

Jadi dari temuan itu kami tindaklanjuti, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi dari 482 rekomendasi, 403 rekomendasi atau 83,61% senilai 134,2 Miliar atau 75,35% sudah sesuai jadi rekomendasinya apa tindak lanjutnya sudah sesuai dengan rekomendasi, dan yang belum sesuai atau masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 18 rekomendasi atau 3,73% senilai 20.856.908.010,82 Rupiah atau sebesar 11,71%.

Yang belum ditindaklanjuti sebanyak 60 rekomendasi atau 12,45% atau senilai 23, kurang lebih 23 Miliar, ini yang belum ditindaklanjuti sesuai yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak satu rekomendasi atau 0,21% senilai 31,770 Juta.

Nah, jadi itu yang kami sampaikan dan sampai hari ini kami terus berupaya maksimal untuk menuntaskan rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya ataupun yang belum ditindaklanjuti terutama itu tadi 60 rekomendasi atau 12,45% dari rekomendasi tadi.

Izin Kami lanjutkan untuk menyampaikan Pendahuluan RKA KL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024.,

Nah, di sini kami apa tema dan arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024, khususnya BMKG mendukung Prioritas Nasional Nomor 6 jadi peran apa, kegiatan atau peran BMKG ini adalah mendukung tema atau Prioritas Nasional Nomor 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Jadi anggaran untuk tahun 2024 difokuskan untuk hal tersebut, dan prioritas nasional keenam ini terkait tadi sekali lagi lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, saya ulangi peningkatan ketahanan terhadap bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Ini khususnya kami melakukan kegiatan dengan *Major Project* berupa penguatan sistem peringatan dini, yang di sini khususnya sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi.

Kemudian sasaran utama untuk bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dalam rancangan awal RKP 2024 ada tiga sasaran utama yaitu meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dengan indikator kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat tiga menit untuk tahun 2024, nah untuk tahun 2023 adalah tiga setengah menit.

Nah, kebetulan tadi dini hari pukul nol-nol lebih berapa menit ya, lima menit lah sekitar itu terjadi gempa dan *alhamdulillah* ini tahun 2023, kami tadi malam saya cek itu peringatan dini atau apa info dini disampaikan dalam waktu tiga menit tadi malam.

Kemudian sasaran yang kedua adalah meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana, indikatornya adalah persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi dan tektonik, nah targetnya adalah 100%, untuk tahun ini masih 96%.

Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya akurasi-informasi Meteorologi dan klimatologi, untuk akurasi-informasi Meteorologi targetnya 91%. Akurasi informasi klimatologi targetnya 83%.

Kemudian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran, pembangunan di BMKG Tahun Anggaran 2024 dengan tema rencana kerja pemerintah 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kebijakan tahun 2020 hingga 2024 adalah apa di BMKG adalah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkelas dunia dengan spirit *socio-entrepreneur*.

Nah, isu strategisnya adalah SDM, terkait dengan kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan juga kebutuhan organisasi atau kebutuhan membangun organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi secara cepat

terhadap berbagai perkembangan, dan yang ketiga adalah isu perlunya pemenuhan layanan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika yang cepat, tepat, akurat dan luas jangkauannya serta mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, isu strategis yang keempat adalah penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG, dan isu strategis kelima adalah kebutuhan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.

Nah, langsung saja rencana kerjanya adalah di *slide* nomor 21, di sini mohon izin kami sampaikan rencana kerja yang terkait dengan Pagu Indikatif BMKG Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sumber dananya yaitu kami mendapatkan sumber dana dari Rupiah murni sebesar 2,3 Triliun kurang lebihnya, dari pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar 94,5 Miliar, dari pinjaman luar negeri untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 363 Miliar sehingga total jumlahnya adalah ditargetkan sebesar 2,769 Miliar.

Nah, programnya ada dua program utama yaitu dukungan manajemen yang akan dialokasikan sebesar 1,23 Miliar dan program meteorologi, klimatologi, dan geofisika akan dialokasikan sebesar 1,539 Miliar.

Nah, pagu indikatif ini termasuk untuk belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, dan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit.

Nah, komposisi pagu indikatif ini terlihat bahwa yang terbesar yaitu 47,61% yaitu belanja barang, kenapa belanja barang karena sejak tahun 2019 dengan dukungan Komisi V BMKG mendapatkan kepercayaan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas instrumen-instrumen atau alat operasional utama.

Jadi jumlahnya semakin melompat dan saat ini pemeliharaannya menjadi terasa harus tetap dipelihara jadi pemeliharaannya dulu sangat relatif kecil sekarang pemeliharaan menjadi proporsi yang terbesar karena penambahan alat-alat yang cukup luar biasa berkat dukungan dari Komisi V, dan dari sini terlihat bahwa proporsi berikutnya adalah untuk belanja modal, mohon maaf proporsi berikutnya adalah untuk belanja pegawai sebesar 28,11% dan belanja modal sebesar 24,28%, nah pagu indikatif BMKG ini tadi disampaikan sumber dananya rupiah murni, PNBPN dan pinjaman luar negeri.

Rinciannya adalah untuk operasional ini sebesar pagu indikatifnya ya, sebesar 1,020 Miliar ini, kemudian non operasional sebesar 1,748 Miliar dan total menjadi 2,769 dari angka operasional tersebut yang 1,020 miliar itu diperoleh dari Rupiah murni, kemudian yang non operasional 1,748 Miliar itu diperoleh dari Rupiah murni sebesar 1,291, kemudian dari PNBPN sebesar 94,538 Miliar dan dari pinjaman luar negeri sebesar 363 Miliar sehingga total kami mendapatkan sumber dana terbesar dari Rupiah murni sebesar 2,3 Miliar, sedangkan dari pinjaman luar negeri sebesar 363 Miliar dan PNBPN 94,5 Miliar.

Perbandingan pagu renstra setelah 2024 dibandingkan dengan pagu indikatif BMKG 2024, di sini terlihat Pagu Renstra itu 3,769 Miliar jadi selisihnya kurang lebih 1 Miliar lebih rendah pagu indikatifnya sehingga terjadi *backlog* itu tadi hampir 1 Miliar yaitu 999,900 mohon maaf Triliun, mohon maaf Bapak triliun, jadi saya ulangi ya tadi 3,769 Triliun itu Renstranya, pagu indikatifnya 2,769 Triliun sehingga *backlog*nya hampir mencapai 1 triliun atau 999,9 Miliar.

Nah ini kita lihat grafik berikutnya perkembangan *backlog*, jadi setiap tahun anggaran itu selalu *backlog* tapi sangat fluktuatif dan sebetulnya tahun 2023 ini *backlog*-nya relatif menurun tapi meningkat lagi di tahun 2024 hampir 1 Triliun.

Mohon izin kami lanjutkan tentang perbandingan pagu kebutuhan 2024 dengan pagu indikatif, ini mungkin mohon izin kami singkat saja, jadi untuk penyelenggaraan, penyelenggaraan pendidikan program diploma ini terjadi *backlog* 53,8 Miliar, layanan hukum dan kerjasama organisasi dan humas ini *backlog*nya 15,6, dan seterusnya, nah yang tidak *backlog* ini adalah jadi malah meningkat adalah untuk pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga.

Nah, ini memang sengaja sejak tahun lalu kami melompati alokasi untuk SDM, karena untuk memenuhi target hingga tahun 2030, eh 2028 bahkan, 2028 harus paling tidak ada 500 Doktor baru dalam SDM BMKG karena tantangan fenomena cuaca iklim dan geofisika ini semakin rumit, tidak pasti, maka daya analitik SDM kami ini harus diasah dan diperkuat sehingga memang kami menginvestasikan untuk pengelolaan SDM Ini, adanya peningkatan anggaran dan terima kasih Komisi V untuk tahun lalu sudah menyetujui peningkatan tersebut.

Kemudian, iya saya rasa yang meningkat hanya di SDM dan untuk penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi, geofisika sebesar peningkatannya 235 Juta.

Kemudian sasaran strategis target kinerja, ini kita lihat untuk mewujudkan layanan prima dalam bidang meteorologi, klimatologi, geofisika tematik berbasis dampak dan risiko tentang akurasi kami targetkan untuk meningkat menjadi 93% dari 92, untuk indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 3,85 dari 3,8 skala tertinggi 4, lalu untuk persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi Meteorologi, klimatologi, geofisika targetnya harus 100%.

Kemudian untuk sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik kami targetkan nilai Kemenpan RB dan nilai RB BMKG, maaf nilai Kemenpan RB atas reformasi birokrasi di BMKG targetnya adalah 93 dari tahun ini 91.

Kemudian program meteorologi, klimatologi, geofisika, sasaran programnya untuk yang pertama meningkatkan layanan informasi meteorologi yang berkualitas, akurasi informasi adalah 93% targetnya, kemudian akurasi

informasi klimatologi 92%, untuk informasi geofisika akurasi ditargetkan 94%, lalu untuk persentase layanan pengelolaan peralatan operasional utama berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi targetnya adalah 94%, dan untuk program dukungan manajemen meningkatnya tata kelola yang baik atau khususnya untuk opini-opini BPK atas laporan keuangan targetnya WTP, lalu nilai Kemenpan RB atas evaluasi LAKIP BMKG adalah targetnya A.

Kemudian ini *slide* berikutnya adalah *highlight* program kegiatan di tahun anggaran 2024 di BMKG ini tadi secara umum kami *summary* kan di halaman ini.

Kemudian *slide* nomor 31 ini *exercise* pagu indikatif BMKG untuk per program, per kegiatan, jadi program dukungan manajemen ini di sini kita lihat penyelenggaraan pendidikan program Diploma STMKG ini anggarannya di daerah yaitu sebesar 44,9 M, lalu untuk layanan hukum, kerja sama organisasi dan humas sebesar 33,885 M, untuk peningkatan koordinasi penyusunan rencana dan tarif dan seterusnya sebesar 21 M, ini yang tertinggi adalah pengelolaan untuk pengelolaan dan pembinaan SDM sekali lagi ini memang kami sengaja untuk pembinaan SDM ini tertinggi di sini adalah dari di pusat 334 M dan di daerah di daerah 680 M kurang lebihnya.

Jadi ini tidak hanya untuk SDM saja, tetapi juga untuk keuangan termasuk gaji, kemudian perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga BMKG sehingga total sebesar 1,014 Triliun.

Itu, lalu untuk pendidikan dan pelatihan SDM di sini 71 M kurang lebihnya, kemudian untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini yang tertinggi adalah 209,077 M anggaran dialokasikan di pusat untuk pengelolaan jaringan komunikasi, tertinggi berikutnya adalah untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar 165 M di pusat dan 53 M koma delapan 53,8 M di daerah, tertinggi yang ketiga adalah untuk pengelolaan meteorologi penerbangan sebesar 132,7 M di pusat dan di daerah 173,68 M total 306.

Mohon izin, mohon izin saya ulang.

Jadi kalau secara total ya, kalau secara total yang tertinggi justru meteorologi penerbangan anggarannya sebesar 36,479 M, tertinggi yang kedua baru di sini adalah untuk pengelolaan instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa di BMKG sebesar 243 M, dan tertinggi yang ketiga adalah untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar 209 M, tertinggi keempat adalah untuk pengelolaan jaringan komunikasi sebesar 209 M, dan tertinggi kelima adalah pengelolaan seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu sebesar 116 M.

Izin, selanjutnya adalah pemeliharaan ini pengeluaran jaringan ini ya yang terbesar, pengelolaan ini terutama untuk pemeliharaan ini apa nilainya yang besar.

Kemudian *slide* berikutnya di halaman 34 ada beberapa kegiatan yang masuk prioritas nasional, jadi ini misalnya pengembangan sistem *big data* dan *high performance computer* atau HPC melalui *Project Bank Dunia* atau IDRIP, ini, dialokasikan ya usulan BMKG adalah 33 Miliar.

Kok hanya 33 Miliar. Oh ini, iya-iya ini dibagi ini. Ini *multi years* ya, jadi *multi years* jadi ini 33,943 Miliar untuk tahun 2024 karena sebagian besar ada di tahun 2023.

Kemudian untuk peralatan *monitoring* gempa bumi dan tsunami melalui *Indonesian disaster resilience initiatives project* yang didanai Bank Dunia sebesar 90,6 Miliar, kemudian jaringan informasi dan komunikasi meteorologi, klimatologi, geofisika melalui IDRIP sebesar 45 Miliar.

Sebentar, mohon izin Pak, sebentar. Oke,

Jadi mohon izin yang saya bacakan adalah yang kami usulkan, jadi ini masih masih dalam pembahasan ya belum, belum diputuskan ini, jadi yang kami baca yang usulan BMKG.

Kemudian tadi untuk layanan informasi meteorologi maritim sebesar 39,2 M, kemudian untuk peralatan penguatan *strengthening climate and weather service capacity* fase 2 atau MMS-2 ini hanya satu, satu juta ya, satu M maaf, hanya satu M.

Kemudian pembangunan alat pendeteksi geser angin atau *windshear* melalui FIR ada 100 Miliar, kemudian yang lain-lain, oh ini terutama yang agak tinggi adalah layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas sebesar 27,4 M, dan pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas sebesar 39,867 M.

Kemudian selanjutnya ini yang cukup besar yang besar juga ini untuk pemeliharaan, sekali lagi pemeliharaan proporsinya 47% ya, jadi ini rinciannya antara lain pemeliharaan operasional Aloptama MKG sebesar 130,799 M, dan pemeliharaan operasional Aloptama MKG di daerah, ini khusus di daerah sebesar 101,768 Miliar.

Nah, sehingga total untuk apa rincian atau total untuk kegiatan dengan prioritas nasional total adalah seratus, total 710 Milyar, 710.880.832.000.

Seperti itu, dan penutup izin kami sampaikan bahwa realisasi anggaran di BMKG Tahun Anggaran 2023 per 31 Mei 2023 untuk realisasi keuangan sebesar 25,69% dan realisasi fisik sebesar 34,06%, hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2022 Terdapat 482 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 421 rekomendasi sehingga masih terdapat 60 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut dan satu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Kemudian usulan RKA BMKG tahun 2024 berdasarkan Renstra BMKG 2020-2024 sebesar 3,769 Triliun, surat bersama Menkeu dan Men PPN serta, maaf, yang tetanggal 10 April 2023 tentang pagu indikatif belanja Kementerian lembaga dan dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024, BMKG mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 2,769 Triliun sehingga terdapat *backlog* sebesar 999,91 Miliar Rupiah.

Backlog tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kerapatan jaringan Aloptama dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi, sarana pendukung operasional cuaca iklim dan gempa bumi, serta pemenuhan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam rangka pemeliharaan peralatan operasional utama MKG.

Selanjutnya kami mohon dukungan, arahan, masukan, dari atau bimbingan dari yang kami muliakan Bapak Ketua atau Pimpinan Komisi V DPR RI beserta apa para Anggota Komisi V DPR RI untuk pemenuhan *backlog* anggaran di tahun anggaran 2024 agar BMKG dapat menjalankan program pembangunan tahun 2024 secara maksimal.

Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan mohon bimbingan dan arahan lanjut.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Terima kasih Ibu Kepala BMKG atas penjelasannya kepada kami.

Jadi, Pagu indikatif itu sebesar 2,7 ya Bu ya 2,7 Triliun, sementara usulan itu 3,7.

Nah, ini kan masih pagu indikatif Pak, Bu, Bu Kepala Badan, mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi pada waktu pagu definitif nanti.

Dan saya melihat di sini juga realisasi anggaran itu masih rendah bu ya, tapi masih bulan Mei, saya lihat realisasi anggaran 25% keuangan, kemudian 34% fisik, mudah-mudahan nanti setelah Mei berjalan sampai akhir tahun realisasi anggaran itu bisa terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan.

Baiklah Bapak, Ibu sekalian, Saya persilakan kepada Anggota Komisi V untuk bertanya. Yang pertama dari Pak Tamanuri. Silakan, Pak.

F – P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Makasih Pak Ketua.

Kawan-kawan Anggota Dewan,

**Yang saya hormati,
Ibu Kepala BMKG beserta seluruh Deputi,
dan rekan-rekan yang lainnya.**

Pak Eko nih, yang sering ketemu sama saya nih.

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh,

Saya *pointer-pointer* saja, yang pertama kali jempol dua, enam tahun berturut-turut WTP, bukan wajar tanpa pemeriksaan, wajar tanpa pengecualian.

Kemudian selanjutnya ini yang tidak boleh terulang lagi kelebihan pembayaran, tolong itu. Masa kita bisa lebih pembayaran kita, kalau kurang nggak apa-apa Bu, orang nangih sama dengan ini lebih gimana, kalau sama orang luar negeri lebih kacau kita.

Kemudian ada rekomendasi, satu rekomendasi yang tidak bisa ditindak lanjut secara sah ini mohon penjelasan.

Yang selanjutnya, saya hari senin ketemu sama Balai kita di Lampung, anak buah ibu yang ada di Lampung itu mengeluh karena polusi batubara yang dari sebelah lebih kurang 100 meter, saya aja di situ kira-kira satu jam sudah hitam kena polusi itu.

Nah, jadi kita khawatirkan ini kita punya peralatan kalau numpuk kena debu itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tapi ini nggak bisa diselesaikan oleh kawan-kawan kita di Lampung, harus Ibu.

Ada, yang kawan adanya di apa itu yang di sebelah KPK itu, jalan apa itu, kompleks apa, jalan Kuningan ya, di Kuningan situ kantornya, ibu harus selesaikan kalau nggak, nggak bisa, Bumi Waras, kalau tingkat yang di bawah itu nggak mungkin ada, Jadi harus Ibu turun, kalau nggak ini tidak berfungsi dan kasihan sama teman-teman kita Bu satu tahun mereka kena paru-paru semua karena itu sudah tertutup sedemikian rupa ASI masih aja di dalam itu hitam.

Jadi solusinya itu bagaimana caranya kalau nggak kantor kita pindah, memang itu bukan, bukan tanah kita, tanah Pelindo, cuman kantornya kantor kita yang bangun, miliaran itu rugi kita itu.

Cuman ini harus Ibu tindak lanjut cepat, cepat karena pertama kali staf kita, manusia kita yang ada situ kasihan, untung itu si Nanang baru, baru dua minggu, kalau dia dua tahun disitu kena TBC dia, kemudian yang lainnya sudah mengeluh semua.

Saya rasa demikian. Atas perhatian Ibu kamu ucapkan terima kasih,

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Iya. Ibu Cen dulu, Pak ya. Setelah Ibu Cen baru Bapak Soehartono.

Silakan, Buk Cen.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Kepala, eh Bu Kepala dan jajaran.**

Bu Profesor, Terima kasih kemarin kita ke serasan *alhamdulillah* semua aman, Ibu sudah di sana luar biasa BMKG Garda terdepan untuk data terbaik untuk cuaca.

Bu Profesor saya lihat ini masih 25% benar padahal ini udah bulan lima, kita asumsi setengah tahun lagi Ibu harus mengejar 70%, benar, jadi saya rasa memang agak riskan, tapi saya percaya Ibu mungkin pasti dengan tim BMKG pasti bisa.

Tapi saya melihat penjelasan Ibu banyak masalah yang dari luar negeri, banyak sekali, dan hampir setiap tahun itu yang terjadi, mungkin Ibu harus punya solusi dan *special treatment* bagaimana, karena jangan selalu terjadi.

Apakah karena kredibilitas kita tidak diyakini atau bagaimana, mengapa hal ini harus selalu terjadi, dari luar negeri itu saya lihat setiap pemaparan Ibu. Jadi mungkin Ibu harus punya solusi, saya percaya Ibu pasti bisa.

Yang kedua ini yang selalu saya tanyakan, bagaimana dengan radar saya, bukan hanya untuk pengumpulan data Bu tapi untuk marwah kita untuk NKRI, karena saya memintanya untuk Pulau terluar, untuk marwah kita sebab menjaga kedaulatan udara dan air. Jadi saya harapkan dapat direalisasi, apakah dengan anggaran sisa atau bagaimana.

Jadi itu saja Pimpinan, itu saja Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen.

Ini radar apa Bu Cen? Radar udara? Cuaca? Di Pulau Natuna. *Nah*, saya sudah tebak itu Bu, di luar pasti Kepulauan Natuna. Itu penting, tuh Bu. Pulau terluar kita, demi NKRI.

Ya, saya persilakan Bapak Soehartono, silakan Pak.

F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO, M.Si):

Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG.**

Selama delapan tahun saya menjadi Anggota DPR, baru kali ini saya menggunakan corong ini untuk bicara dengan BMKG, selama ini maaf saya banyak absen dan apa ya diam, memang dasar saya ini seorang praktisi bukan seorang politisi, nggak bisa macam-macam gitu.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan dan mengapresiasi kinerja BMKG dilihat dari sisi laporan keuangan sudah enam kali berturut-turut WTP, ini sesuatu yang sangat dibanggakan tentunya, *clean goverment* itu begini ya kira-kira ya, kira-kira seperti ini.

Kemudian saya hanya berharap agar Pagu 24 ini dapat meningkat sehingga jangkauan BMKG ini semakin luas begitu, kebetulan di Dapil saya itu Dapil aman, Dapil saya itu Dapil VIII Jawa Timur jadi Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto di situ itu kayak nggak ada gempa kecuali gempa dari angin ya ada, paling banjir, banjir ya sekarang sudah dapat diatasi karena banyak manuver atau banyak pembangunan yang dikerjakan oleh PUPR.

Ketika PUPR itu mendengar suara Dapil, karena Dapil lah yang tahu, salah satu contoh di daerah saya itu ada yang tiap tahun banjir, kalau banjir itu genangan sampai seminggu dan dua minggu itu, ketika PUPR ini merealisasikan usulan Dapil bahwa di Madiun itu daerah terendahnya itu, itu di Kecamatan Balerejo itu dinormalisasi, sekarang aman, dua tahun aman, *insya Allah* setelah ini banjir di situ tidak ada.

Itulah satu hal yang mendengarkan orang yang memang memberi informasi yang sangat apa ya, akurat, karena memang dia hidup di situ gitu ya, saya tuh hidup saya di situ sehingga banjir saya juga tahu air asalnya dari mana, sehingga ketika kita memberi masukan bagus.

Ya oleh karena itu besar harapan kami Pagu yang didapatkan BMKG ini meningkat, dan ketika meningkat ini belanjakan sesuatu yang sangat penting.

Ya semua memang penting, tapi dari yang penting-penting itu ada yang terpenting, yang terpenting dululah kira-kira yang perlu dilakukan.

Saya kira demikian aja Bu, himbauan atau harapan dari saya selaku Anggota DPR dari Dapil VIII Jatim.

Terima kasih,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya persilakan Pak Harvey.

Kemudian siap-siap Pak Sigit.

F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati dan juga Anggota Komisi V, dan tentunya juga Ibu Kepala BMKG, beserta jajarannya yang saya hormati.

Sedikit saja dari Saya beberapa waktu yang lalu kami Komisi V datang ke Maluku tepatnya ke Ambon waktu itu dalam rangka kunjungan reses kami dan saya bertemu langsung dengan kepala stasiun geofisika kelas I di Ambon waktu itu dan pada saat itu kami datang ke Ambon juga dalam rangka mengunjungi, tadinya mau mengunjungi Saumlaki tetapi tidak jadi karena setelah kejadian gempa bumi di Saumlaki tersebut Ibu.

Nah, dengan bertemunya kami dengan kepala stasiun geofisika di Maluku, di Ambon khususnya di Karang Panjang beliau menyatakan bahwa beliau membutuhkan apa renovasi kantor geofisika, stasiun geofisika kelas I di Karang Panjang, Ambon Ibu.

Nah, saya, itu memang bukan, bukan Dapil saya, tetapi sebagai Anggota DPR RI ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk membantu mitra yang membutuhkan renovasi kantor seperti yang saya terima dari Kepala geofisika, stasiun geofisika di Ambon.

Ini tentunya guna mendukung kelancaran pelaksanaan stasiun tersebut Ibu ya, jadi saya mendapatkan data-data dan juga usulan dokumentasi yang akan saya berikan.

Izin Pak, Pimpinan boleh saya berikan langsung ya Pak ya kepada Ibu. Itu saja dari saya, terima kasih banyak.

Selamat sore, Ibu.

KETUA RAPAT:

Langsung berikan Pak Harvey.

Ini titipan dari luar Dapil Pak Harvey ini Bu, karena kita DPR RI Pak Harvey ya, seluruh Indonesia. Ya silakan.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Siapa-siap Pak Irwan setelah ini.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu Kepala dan jajarannya yang kami banggakan, Teman-teman Anggota Komisi V dan tentu Pak Ketua yang sangat kami banggakan.

Pasti, kalau kita mencermati tahun, dari tahun ke tahun pagu indikatif selalu di bawah dari pagu kebutuhan, ya.

Selalu kayaknya, belum pernah saya ketemu pagu, maaf pagu kebutuhan lebih, lebih tinggi daripada, eh maaf pagu indikatifnya lebih tinggi daripada pagu kebutuhannya.

Mungkin itu bagian dari strategi Ibu Menteri Keuangan mungkin untuk menghemat anggaran biar nggak, biar nggak berfoya-foya gitu kira-kira begitu ya, biar tidak dipakai berfoya-foya gitu kira-kira.

Tetapi yang ingin saya pastikan adalah akan ada proses selanjutnya, tinggal kami diyakinkan di DPR RI ini program-program apa yang tidak boleh berkurang, tadi kan di poin yang di halaman 37 poin yang keempat Bu Kepala mengatakan *backlog* ini mengakibatkan tidak terpenuhinya ABCDE, tentu kami ingin lebih detail lagi, apa yang tidak boleh kurang gitu.

Masa anggaran kebutuhan *backlog*-nya hampir satu Triliun terus ya baik-baik saja gitu, ya mustinya tidak baik-baik saja gitu, satu Triliun loh Bu Kepala, ya Pak Sestama. Iya kan, satu Triliun, angka yang besar, ya 30% lagi, jadi ada sesuatu.

Terutama kalau bagi kami Anggota DPR, apalagi yang kita sekarang sudah ada di ujung-ujung masa jabatan ini, sekolah lapang-sekolah lapang yang banyak melibatkan pelatihan untuk konstituen kami itu jangan sampai berkurang kalau perlu ditambah ya, kami tidak ingin itu dikorbankan gara-gara Pagu kebutuhannya di bawah, eh Pagu indikatifnya di bawah pagu kebutuhan ya jangan sampai dikorbankan, jadi semakin banyak sekolah lapang cuaca, sekolah lapang apalagi, iklim ya, itu semakin baik bagi kami dan itu memberikan *branding* kepada BMKG sebagai salah satu lembaga yang paling dibutuhkan di tanah air ini.

Kami bersama Pak Harvey waktu itu kunjungan ke Ambon, mestinya kunjungan kami adalah ke Saumlaki, iya kan Pak Harvey ya, tetapi kami tidak bisa ke Saumlaki karena tinggi gelombang, ya.

Jadi ini kayaknya harus ada perencanaan, harus nyambung BMKG dengan perencanaan perjalanan kerja kita, kunjungan spesifik-spesifik kita, sehingga jangan sampai kita sampai nggak jadi, nggak jadi nyebrang gitu, akhirnya yang dari Saumlaki yang datang ke Ambon, gitu.

Nah, saya kira ini penting menurut saya, jadi Ibu Kepala jangan sampai ada alat yang tadi dikatakan jaringan Aloptama atau jangan sampai ada dukungan operasional tugas dan fungsi yang itu menyebabkan, apa namanya, pengurangan yang signifikan pada hal-hal yang menurut kami penting, sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim, penting menurut kami ya.

Itu yang pertama, yang kedua ini kita sering hari-hari ini mendengar tentang suhu tinggi.

Apakah alat-alat untuk memonitor atau untuk mengetahui, memprediksi, mengantisipasi suhu iklim global dan sekarang sudah mulai mengkhawatirkan karena suhu tinggi itu ternyata menyerang semua negara bukan hanya India, bukan hanya China, tetapi Indonesia juga itu, apakah itu sudah ada.

Nah, ini juga jadi pertanyaan mendasar, kenapa, kalau masalah perawatan masalah alat dan seterusnya semua sudah dikalibrasi, dirawat, dan sebenarnya terus bagaimana dengan pengadaan alat-alat baru untuk mengantisipasi.

Yang selalu dikatakan oleh Ibu, disampaikan adalah tsunami ya, kemudian apa tadi itu tsunami, gempa bumi tetapi ini sekarang ada lagi muncul baru yaitu suhu, suhu tinggi akibat mungkin pemanasan global apa-apa, tetapi akibatnya cukup mendasar.

Ada tabrakan kereta api di India ya, jadi analisa para ahli mengatakan kenapa India paling sering keretanya keluar rel, jangan-jangan juga karena sering ada suhu tinggi di sana.

Negara yang paling banyak korban kecelakaan kereta api dan paling banyak kasus kereta api keluar rel itu di sana, jangan sampai kita juga begitu karena kurang antisipasi terhadap suhu udara yang tinggi, kemudian menyebabkan kecelakaan-kecelakaan untuk kendaraan berbasis rel yang besi yang akhirnya mungkin dia bengkok atau mungkin karena suhu yang tinggi di dalam dan berlangsung dalam waktu yang lama itu menyebabkan kecelakaan.

Jadi pertanyaan yang kedua saya adalah, apa, bagaimana dengan alokasi pembelian alat-alat baru mengantisipasi ya perubahan iklim yang selama ini kita belum biasa tangani, kalau masalah tsunami dan seterusnya kita sudah biasa tangani.

Ada lagi yang belum biasa kita tangani, kemarin saat di Lombok itu saya cerita ya dengan Pak Sestama tentang gunung di bawah laut, *nah*, itu kan butuh alat-alat baru juga karena Indonesia ini termasuk daerah yang potensinya tinggi ya.

Di Lombok kemarin laporan yang kami dapat semua jenis bencana itu ada di sana, gunung berapi ada, angin ada, gelombang tinggi ada, semuanya ada di sana.

Lalu bagaimana kita melindungi tanah tumpah darah kita dengan bencana yang mungkin harus kita antisipasi yang sebetulnya itu potensial mengundang bahaya, misalnya letusan gunung di bawah laut yang kita mungkin belum ada petanya atau suhu tinggi yang kita baru merasakan akhir-akhir ini ya, oh begini rupanya suhu tinggi itu, tapi kita masih belum seberapa ya dibanding negara-negara lain sampai puluhan yang meninggal, meninggal gitu bayangkan suhu tinggi yang menyebabkan puluhan orang meninggal.

Saya kira dua pertanyaan dan tentu yang terakhir selamat atas WTP yang terus bertahun-tahun jadikan sebuah tradisi dan semoga menjadi SOP yang baik bagi pejabat-pejabat selanjutnya, sehingga jangan sampai kemudian balik jadi apa namanya, ada tidak, tidak WTP lagi gitu.

Terima kasih, saya kira itu Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Selanjutnya Pak Irwan, silakan Pak Irwan.

Yang terakhir siap-siap nanti Pak Willem Wandik. Silakan, Pak Irwan.

F – P. DEMOKRAT (Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, serta rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan.

Yang saya hormati Kepala BMKG Bu Profesor, beserta seluruh jajaran BMKG yang hadir pada rapat hari ini.

Saya ada dua pertanyaan nih, pertama Bu Profesor, tanggal 5 Juni dan 6 Juni itu terjadi gempa di Sangkulirang, Kutai Timur, istilah masyarakat sekarang itu dua malam itu ada kawah goreng, bahasa Indonesianya tuh masyarakat itu panik dua malam itu nggak bisa tidur, ada yang berjaga di luar rumah.

Terkait ini mungkin saya mau tanya, apakah seperti peralatan seismograf untuk informasi gempa bumi dan tsunami itu sudah ada di Sangkulirang ya, Kutai Timur, Kaltim ini atau peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) ini sudah ada gitu.

Karena memang selama ini kan Kaltim kan dianggap, diidentifikasi itu sebagai aman gitu, tetapi faktanya ini masyarakat panik ini, belum lagi informasi terkait potensi tsunami dan lain-lain itu juga harus kemudian sampai ke masyarakat.

Kasih ini, ini kampung saya nih, kampung kelahiran saya ini Sangkulirang, beberapa puluh tahun nggak pernah gitu tiba-tiba ada gempa bumi 4,3 ya skalanya itu dan sampai hari ini masih terjadi gempa-gempa susulan yang kecil itu yang membuat masyarakat panik sehingga saya pada kesempatan ini meminta agar tadi bisa dijawab, tetapi kalau memang belum ada saya meminta ini diadakan ya peralatan seismograf untuk informasi gempa bumi dan tsunami termasuk IDRIP tadi.

Nggak bisa diremehin nih gitu ya, dipindah IKN ke Kaltim karena katanya nggak ada gempa tapi ini mulai ini ya 4, saya pikir itu nggak bisa di apa namanya diremehkan, tetapi tentu kita harus siaga dan saya pikir BMKG lah yang paling paham mengenai apa namanya mitigasi terkait gempa bumi ini.

Kemudian saya juga meminta nih karena di sini juga ada sekolah lapang gempa bumi, ya jangan di Jawa saja nih, saya minta di Kaltim juga diadakan nih Bu, ini masyarakat juga harus mulai paham nih masyarakat Kalimantan ini, bahwa juga jangan terlena, kalau terlena ini bahaya nih tiba-tiba kejadian masyarakatnya nggak paham bagaimana, apa namanya, menangani gempa, kemudian pada saat terjadi gempa harus bagaimana ini sangat penting.

Jadi saya meminta agar ada sekolah lapang gempa bumi di Dapil saya di Kaltim, termasuk pengadaan peralatan seismograf tadi untuk informasi gempa bumi dan tsunami, termasuk kalau memang penting ya saya pikir IKN juga harus ada IDRIP ini.

Kemudian terkait sekolah lapang cuaca nelayan ini sangat bagus dan kita tahun ini juga ada pelaksanaannya di Berau dan kami sangat terima kasih ini sangat membantu nelayan kita, nelayan pesisir di Kaltim dan berharap untuk 2024 juga tetap dilanjutkan, ya ini sangat mendukung untuk apa namanya optimalisasi produksi hasil nelayan di Kalimantan timur.

Kemudian mohon atensi Bu ya, apa namanya terkait apa namanya, permohonan saya tadi, ini untuk bicara mengenai keselamatan dan apa namanya, nyawa manusia nih ya, dibilang gak ada gempa di Kaltim ternyata ini gempa terus nih.

Kemudian yang kedua, ada fenomena bisa dilihat di berita di Kompas tuh, Kabupaten Berau ya di Kaltim itu, Berau, judul beritanya itu Berau memanas, kematian meningkat dan petani bekerja di malam hari.

Jadi memang ada kenaikan suhu 0,95 derajat celcius dalam 16 tahun terakhir ini di Berau, apakah fenomena ini juga menjadi perhatian dan penelitian BMKG, karena ini berdampak ya pada apa namanya keselamatan nyawa manusia juga, tapi yang jelas sangat apa namanya mengganggu aktivitas petani karena memang terasa banget suhunya ya, apakah kemudian juga BMKG ada penelitian terkait peningkatan suhu ini dan walaupun memang sudah ada misalnya peralatan untuk pengamatan pendekatan suhu ini saya pikir ini juga penting ya untuk apa namanya BMKG mengadakan.

Pimpinan saya pada kesempatan rapat ini BMKG ini kita jangan remehkan ya, saya pikir negara besar ini kok tiap tahun BMKG ini anggarannya kayak apa namanya gitu menunaikan kewajiban saja gitu loh, yang penting ada anggaran, nggak bisa.

Kita sebagai bangsa besar BMKG ini saya pikir kita harus bekal dengan apa namanya, fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan, saya pikir kalau informasi data kita juga siap itu juga memitigasi bencana juga bagi informasi gitu loh untuk apa namanya masyarakat kita ya dalam perekonomian dan lain-lainnya.

Jadi pada kesempatan ini saya minta ini ditambah lah, ini kok banyak nol-nolnya nih untuk tahun 2024 nih ya.

Mungkin itu saja Pimpinan, tapi saya minta garis apa namanya prioritas tadi Bu terkait mengenai gempa bumi di Sangkulirang ini, saya meminta peralatan seismograf memang belum ada, kemudian IDRIP, masuk sekolah lapang gempa bumi di Sangkulirang ini.

Terima kasih,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua, dikit, dikit nyelak dikit.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak siapa, Pak Irwan mengatakan jangan meremehkan lah.

Nggak kita gak meremehkan, kita tambah satu triliun aja Pak Irwan nanti tahun 2024 kan ya, ada perubahan kepemimpinan.

F – P. DEMOKRAT (Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Dua triliun juga nggak apa-apa.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Nggak apa-apa, itu kita sampaikan ke Presiden baru nanti.

F – P. DEMOKRAT (Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Nanti kalau Presiden baru 2024 kita tambah berapa triliunnya.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Iya terima kasih. Itu Pak Ketua.

Ini orang oposisi rupanya Pak Irwan ini.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi begini teman-teman.

Ini memang kekurangan dari BMKG ini Pak Irwan, sebesar satu Miliar. Satu Miliar, Bu ya. Eh satu Triliun, *sorry* satu Triliun. Pagu indikatifnya untuk tahun 2024 2,7 Triliun, sementara usulannya 3,7.

Nah, ini kan masih indikatif, namanya indikatif itu bisa bertambah bisa berkurang, nanti akan kita perjuangkan Pak Irwan, nanti akan kita bahas dengan Deputi, kemudian nanti di sini kan ada Banggar, Banggar Komisi V.

F – P. DEMOKRAT (Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Izin, Pimpinan.

Kebetulan saya di Banggar.

KETUA RAPAT:

Nah Pak Irwan ini di Banggar nih Bu.

F – P. DEMOKRAT (Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Saya akan perjuangkan ini nih, saya ingat masyarakat saya ini nih dua malam tak ada tidur itu tuh, *ndak* tidur malam ini.

KETUA RAPAT:

Kemudian kan ada juga, Pak, Pak apa yang dari Nasdem Pimpinan Banggar.

Pak Syarief ya, ada juga Bu, kita Pak Syarief Pimpinan Banggar, nanti akan kita bahas, memang benar kita menginginkan agar anggaran BMKG ini Pak ini bisa bertambah karena memang persoalan-persoalan bencana kan tidak bisa kita anggap kecil, jadi peralatan BMKG itu harus peralatan yang *new update* peralatan yang baru, itu yang diinginkan teman-teman.

Gitu kan Pak Irwan?

Iya, terakhir dari Pak Willem. Silakan Pak Willem.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Pimpinan.

Setengah menit, boleh.

KETUA RAPAT:

Iya, Bu Cen.

Tentang Natuna?

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Mengenai lapang gempa itu, sekolah lapang gempa. Jadi Bu Profesor.

Boleh Pimpinan, ya.

KETUA RAPAT:

Ya, setengah menit ya.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Setengah menit.

Kita-kita ini belum tahu ada sekolah itu yang ada lapang cuaca, lapang iklim, lapang gempa bumi itu nggak pernah kita dapat. Saya di Natuna mau, sering gempa.

Nah saya rasa banyak yang mau, belum pernah tahu kita. Jadi tolong dicatat juga Bu, saya mau yang di Natuna, ya Bu ya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi Bu Cen, kalau berbicara bencana hampir seluruh wilayah di Indonesia ini rawan bencana, apalagi tempat saya Bu Sumatera Barat itu kan cincin *ring* ya, cincin *ring* api ya.

Nah, kita masih ingat dulu bencana gempa bumi tahun 2009, hampir delapan ya, delapan atau sembilan skala richter itu, tujuh atau delapan, itu luar biasa.

Artinya memang, memang diperlukan, oleh karena itu usulan Bu Cen ini, itu nanti bisa Ibu pertimbangkan. bukan hanya di Dapil Ibu Cen Bu ya, di tempat-tempat lain karena memang secara umum seluruh wilayah Indonesia ini rawan bencana.

Ya silakan Pak Willem.

Cukup Bu Cen ya?

F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Ya interupsi sebentar Pak setengah menit.

Saya mau ngiriin aja yang lain buat terima kasih Ibu, di Dapil saya. Saya selama saya menjabat, sudah dua kali sekolah lapang yang saya terima, satu di apa Raja Ampat, dan satu baru-baru ini di Kota Sorong.

Terima kasih banyak Ibu, untuk sekolah lapang gempa bumi ini, yang lain mungkin akan jadi ngiri sama saya kayaknya ini. Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu Bu, Sumatera Barat penting Bu harus kita adakan itu, kalau bisa untuk 2023 ini harus ada itu, Sumatera Barat Ibu tahu kan rawan bencana gempa. Paling bahaya tuh, paling bahaya. Ya udah cukup ya.

Ini Pak Willem, silakan Pak Willem

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.sos.):

Baik.

**Pak Ketua,
Bapak-Ibu Anggota Komisi,
dan juga Sestama,
dan Ibu Prof,
dan seluruh jajaran,
Yang kami hormati.**

Dari kami terkait dengan evaluasi kinerja tentu kami berikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai walaupun ada kekurangan di sana terkait rendahnya serapan, tapi harapan kami kiranya akan terus ditingkatkan supaya bisa mencapai target dengan baik.

Dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI tentu kami juga berikan ucapan selamat atas peroleh opini WTP dan kiranya diharapkan supaya diperhatikan terus, terutama terkait perlu ditindak lanjuti terkait dengan hasil rekomendasi BPK RI.

Dan juga terkait dengan Pembicaraan Pendahuluan RKA KL tolong perhatikan nanti karena menyangkut wibawa kami sebagai Anggota Komisi V di mana kunjungan Komisi berapa minggu yang lalu kami lakukan ke, kunjungan ke NTB ada sejumlah hal yang telah dipaparkan di sana dan sudah kami diskusikan dan kami telah memberikan perhatian dan dukungan karena itu kiranya ini menjadi perhatian kita bersama untuk memberikan dukungan.

Dan juga terkait dengan sekolah lapang cuaca, nelayan, dan juga gempa kiranya menjadi perhatian bagi kami di wilayah Timur, Maluku, dan Papua, Tanah Papua itu memang kami di sana agak ekstrim cuacanya baik di laut, darat, maupun udara karena kami di sana ini hanya musim panas itu hanya dua, Juni sama Juli, selain itu curah hujannya, hujannya sangat tinggi sekali sehingga sering kali terjadi insiden baik di laut, darat, maupun di udara.

Karena itu jadi kami sangat membutuhkan perhatian dalam kegiatan-kegiatan memberikan edukasi kepada warga baik dalam hal penyelenggaraan sekolah lapang cuaca, nelayan, dan juga gempa.

Di mana kami di sana, memang di sana itu banyak gunung, tapi karena banyak gunung sehingga tidak ada gunung berapi, sehingga hampir setiap detik itu selalu ada gempa, kami di Maluku dan juga Papua.

Tapi kadang tidak bisa dideteksi dengan masyarakat, sama tetapi itu bisa dideteksi dengan alat yang dimiliki oleh BMKG.

Oleh karena itu selalu menjadi perhatian supaya bisa meminimalisir resiko dari dampak di sini yang terjadi di laut, darat, maupun udara.

Dan selain itu kami di Papua pegunungan itu sering sekali juga karena cuaca ekstrem yang begitu tinggi sehingga ini kadang memberikan dampak pada rute penerbangan, sering suka *molor*, hari ini kita mau terbang kadang bisa *molor* besok atau enggak lusa, tapi kadang juga kita udah masuk tapi mau keluar nggak bisa karena sudah di atas jam sepuluh tuh udah terjadi perubahan cuaca.

Jadi bisa terbang itu misalnya dari Jayapura kita mau terbang ke Kabupaten di kawasan pegunungan atau di pulau atau di dari kabupaten ke kecamatan itu harus terbang sekitar di bawah jam sepuluh, kalau di atas dari itu udah nggak bisa.

Karena itu perlu edukasi memberikan dan juga sosialisasi terhadap warga dan terutama pada maskapai penerbangan, karena hari ini sering sekali maskapai yang ada di sana seringkali terbang tidak ikuti patokan yang pernah dibuat oleh Belanda dulu, sehingga sering banyak terjadi insiden.

Dulu tuh sudah dibuat, kawasan ini ini bisa terbang hanya sejam lima sampai jam sepuluh, di atas itu nggak boleh, tidak boleh ada penerbangan lagi, tuh, tapi pesawat-pesawat sekarang bahkan hari apa jam sore pun bisa terbang gitu.

Sehingga sering terjadi, banyak sekali terjadi insiden di sana kecelakaan pesawat, karena itu tidak ada kepatuhan terhadap apa namanya satu tradisi yang memang sudah dibangun sejak lama. Karena itu perlu ada proses penyadaran dan edukasi kepada masyarakat dan juga para operator maskapai penerbangan.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya demikianlah, Bapak, Ibu, hadirin-hadirin sekalian.

Jadi Ibu kepala di sini ada tujuh, tujuh pertanyaan dan masukan dari Anggota Komisi V dan kami persilakan untuk Ibu Kepala, untuk menanggapi.

Silakan, Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih sekali Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan.

Izin kami menanggapi mulai yang terakhir ini terutama terkait penerbangan, tadi disampaikan perlu adanya edukasi dan sosialisasi, itu tepat sekali memang kami juga memonitor, memantau fenomena cuaca di Papua terutama di daerah pegunungan-pegunungan itu sangat cepat berubah sehingga Bapak Deputy meteorologi ternyata memang sudah mengagendakan tanggal 19 Juni, 19 Juni ini ada sekolah lapang cuaca, sekolah lapang cuaca penerbangan tanggal 13 dan 19 Juni di Sentani dan di Timika, Bapak.

Jadi, semoga.

KETUA RAPAT:

Pak Willem, itu ada, ada apa Bu, coba ulangi Bu biar Pak Willem dengar.

Penting ini Pak.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Iya, Pak Willem jadi tadi yang Bapak sampaikan bahwa resiko ancaman cuaca yang sangat cepat berubah untuk keselamatan penerbangan, ini kami juga memonitor dan mengamati hal yang sama dan memandang itu *urgent* karena insiden telah terjadi beberapa kali sehingga Bapak Deputi Meteorologi telah mengagendakan di bulan Juni tanggal 13 dan 19 Juni, ini akan dilakukan sekolah lapang cuaca penerbangan untuk di Sentani itu tanggal 13 ya, 13, kalau yang Timika 19 Juni.

Jadi Timika 19 Juni, Sentani 13 Juni, kami berkoordinasi dengan apa ini dengan, oh sudah dengan tenaga ahli Bapak, kami sudah berkoordinasi ya.

KETUA RAPAT:

Berarti sudah aman Bu, ya?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Insyah Allah.

KETUA RAPAT:

Informasi sudah sampai, ke TA nya Pak Willem.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Ke tenaga ahli beliau, mungkin belum ke Bapak.

KETUA RAPAT:

Ditunggu Bapak di sana nanti.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Semoga Bapak bisa hadir juga.

Kemudian pertanyaan yang lain, sekolah lapang cuaca untuk nelayan dan gempap agar dilakukan di Maluku dan Papua, kami sudah melakukan dan akan terus melakukan ya Mas, itu kapannya tuh perlu di, ada jadwalnya.

Sudah dijadwal, jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, memang yang belum pernah di Kalimantan ya? Oh sudah pernah, maaf saya yang salah, sudah pernah di Kalimantan sudah pernah. Bagaimana? Penajam, di Penajam

Pasir Utara, tahun ini di Kutai Timur. Jadi ini sudah diagendakan tanggal 8 hingga 9 Agustus di Kutai Timur Bapak. Gempa, sekolah lapang gempa dan sudah ada delapan peralatan seismograf untuk mendeteksi gempa. Kemudian coba ditayangkan. Oh *sorry-sorry*, dengan. Iya, sudah ada delapan benar.

Kemudian terpasang juga *warning receiver system* yaitu sistem yang apa ya, yang tugasnya secara otomatis menerima informasi apabila gempa terjadi dalam waktu 3 menit. Eh 3 menit ya. 3 menit informasi itu segera diketahui dan disebar, itu ada delapan di kantor BPPD, nah kemudian ini rencana di IDRIP itu akan dipasang juga ya akan dipasang 23 seismograf Pak melalui *Project IDRIP*. Oh mohon maaf, saat ini sudah 23 akan, akan ditambah lagi, Jadi yang sudah terpasang itu 23 seismograf, tapi dengan adanya IDRIP akan mendapat tambahan berapa Pak, ini Bapak Deputy geofisika, minimal dapat tambahan empat lagi, posisinya yang terpasang ini yang hijau tua itu apa Pak.

Posisi. Sangkulirang tuh yang sebelah mana? *Mbok, anu* dengan beliau koordinasi, dengan *anu* staf ahli, Bapak kami mohon komunikasi biar nggak salah, *nggeh*. Tolong dicatat ya, Mas. Iya baik. Jadi itu untuk seismograf sudah, di Papua juga kemudian di NTB tentang gunung api.

Nah, ini tentang gunung api kami perlu menyampaikan kepada Bapak, Ibu Anggota Dewan dan Pimpinan Dewan yang kami muliakan. Untuk gunung api itu di luar, apa ya, jadi BMKG tidak mendapatkan wewenang untuk memonitor gunung api, jadi wewenang itu di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jadi di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral itu ada satu badan yang disebut Badan Geologi dan itu masih di bawah Badan Geologi lagi.

Jadi levelnya dua level di bawah Kementerian disebut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, sehingga memang ini salah satu kelemahan atau kendala kami karena kalau tsunami itu penyebabnya bisa gunung api, sedangkan kami tidak, tidak ada informasi gunung api.

Nah, kami sedang berupaya data-data dari gunung api ini yang ada di Kementerian yang lain itu bisa masuk ke BMKG, karena kalau tidak bisa masuk dapat terjadi seperti kejadian tahun 2019 ada tsunami di Selat Sunda itu karena ada erupsi gunung api yang mengakibatkan gunungnya ambrol kemudian menjadikan tsunami.

Nah, saat itu kami kaget sekali, tidak ada gempa kok bisa ada tsunami, nah saya curiga ini jangan-jangan gunung api tapi kita nggak punya data, sehingga kita istilahnya ya tidak bisa memberi peringatan dini karena tidak ada datanya *nah*, sehingga mulai tahun 2019 kami berupaya bersinergi dengan pusat vulkanologi untuk mendapatkan data tersebut.

Namun sampai hari ini, sudah berapa tahun ya belum berhasil, jadi hanya data masuk kadang-kadang nggak masuk, terus data itu tidak ada meta

datanya, meta data itu adalah lokasinya di mana, ini sangat penting karena untuk menghitung itu kita harus tahu kalau ada data itu posisinya dimana.

Nah, sehingga itu *handicap* kami Pak, kendala kami dalam hal memonitor gunung api memang tidak, tidak ada kemampuan, tidak ada kewenangan meskipun kami berusaha untuk bersinergi.

Jadi kami mohon maaf kalau belum bisa maksimal, tapi kami akan terus berupaya mohon dukungannya.

Kemudian juga kami terima kasih ini atas apresiasi terhadap WTP dan itu tentunya pasti berkat dukungan dari Komisi V yang selalu memberikan bimbingan, arahan, koreksi. Kemudian terima kasih atas dukungan untuk *insya Allah* kenaikan anggaran. Kemudian selanjutnya ini mohon izin kami mulai dari bawah.

Untuk Pak Irwan ini menjadi atensi kami tadi tentang sekolah lapang gempa segera dilakukan ya tadi Agustus ya, sekolah lapang cuaca nelayan akan terus dilakukan ya Pak Eko terus dilakukan.

Kemudian tentang ini, mungkin Pak siapa, Pak Deputi geofisika, gempa yang ini loh yang tanggal lima, enam Juni di Kutai Timur itu kan bisa dilihat ya, itu masih ada gempa-gempa susulan atau bagaimana.

Intinya mohon ditugaskan stasiun yang ada di sana, di Balikpapan untuk menenangkan warga memberikan sosialisasi *plus* informasi dengan datanya, biar kalau tahu apa yang terjadi kan paling nggak agak lebih tenang, lalu apa yang harus disikapi. Jadi mohon izin kami akan segera tindak lanjuti, mohon maaf ini.

Dan tentang kenaikan suhu betul sekali, karena efek atau dampak dari perubahan iklim baik global ataupun lokal, itu sebagai contoh di Puncak Jayawijaya esnya itu diprediksi oleh BMKG, jadi kami melakukan riset tahun 2025 itu esnya sudah habis dan itu akan mempengaruhi tata air di wilayah Papua karena es itu habis.

Kemudian kami ada riset tentang cuaca tersebut Pak dan memang dari hasil monitoring kami kenaikan suhu paling tinggi di Indonesia itu terjadi di Samarinda Pak, di Kalimantan Timur.

Jadi kalau ada di sekitar-sekitar Samarinda ya kenaikan suhunya memang relatif paling tinggi dibandingkan seluruh wilayah Indonesia. Betul 0,9 derajat celcius dan ini sudah menjadi peringatan seluruh dunia dan dari hasil riset BMKG, kalau kita tidak segera melakukan upaya mitigasi, hutannya tidak segera kita reboisasi, bahan bakar fosil batubara masih terus, maksudnya fosil itu masih terus dieksploitasi diprediksi akhir abad 21 atau tahun 2001, maaf tahun 2.100, kenaikan suhu akan mencapai tiga setengah derajat celcius Pak, tidak hanya 0,9, 0,9 itu dampaknya sudah bencana di mana-mana, dapat kita

bayangkan kalau tiga setengah derajat celcius itu dampaknya akan bencana *naudzubillahminzalik* bagaimana.

Jadi ini memang tanggung jawab bersama kami terus melakukan monitoring dan menambah peralatan Pak, ini kami memang mengalokasikan untuk itu.

Jadi tadi pertanyaan Pak Sigit sekaligus tentang apakah peralatan dan perawatan untuk mengantisipasi atau mendeteksi kenaikan suhu ini dialokasikan, ya kami mengalokasikan, namun kami harus cermati dulu bagaimana dampak dengan *backlog* satu T terhadap karena peralatannya kan juga tidak, tidak simpel ya, jadi apa perlu kami cek seberapa, seberapa detail dampak dari pengurangan anggaran ini terhadap ketersediaan peralatan itu. Namun dari Bappenas sangat-sangat mendukung upaya untuk monitoring kenaikan suhu ini dan dampaknya.

Kemudian tadi gunung bawah laut memang kami tidak mampu ya tidak, tidak dilengkapi dengan sarana untuk memonitor meskipun kami berupaya bekerja sama.

Kemudian juga dari Ibu Cen tadi sudah nggak ada ya, tapi itu saya mimpi sampai Ibu Cen yang tentang radar itu karena memang betul sekali yang disampaikan beliau di Natuna itu sangat membutuhkan radar, tapi kami beberapa tahun sudah dua kali ya, dua kali, dua tahun gagal terus untuk mengadakan Radar, kali ini 2024 *bismillah, insya Allah* kami sudah mengalokasikan. Oh malah 2023. Oh ya. Jadi kalau proyek yang MMS-2 itu tadi sudah keluar dokumen resmi, disetujui untuk dijalankan, 2023 radar bisa *insya Allah* bisa diadakan untuk Natuna karena itu memang prioritas utama, ini daerah terluar, terdepan.

Namun kalau itu gagal, kami ada rupiah murni tapi di tahun 2024, jadi tertunda kalau nggak tahun ini, 2024. Ini sudah janji yang lama Bapak, kami mohon maaf atas keterbatasan tersebut.

Kemudian dari Bapak Harvey, ini terima kasih sekali bapak sangat memperhatikan kami, sampai kantor kami saja juga Bapak yang memperhatikan ini malu saya ini, Pak. Terima kasih dan nanti ini kami yang sudah akan, akan ditindaklanjuti Pak Sestama yang akan langsung ini.

Kemudian sudah ya itu ... data ini ada. Ini terima kasih.

Kemudian dari Bapak Soehartono, praktisi beliau, terima kasih atas apresiasinya dan juga atas dukungannya untuk kenaikan pagu anggaran untuk Jatim. *Nah*, ini, Jatim ini ada hal khusus tadi disampaikan bahwa dengan normalisasi sungai berkat mendengarkan dan menindaklanjuti arahan Komisi V khususnya Bapak yang berada dari Dapil tersebut banjir bisa dikendalikan *alhamdulillah* kami juga akan terus untuk mendengarkan, menindaklanjuti saran-saran dari Komisi V.

Namun, ini perlu kami sampaikan bahwa mulai Juni ini, jadi kami sudah memprediksi sejak bulan Februari Pak, kami sampaikan ke Gubernur dan ke pihak terkait mulai Juni, sejak Maret, Februari kami memprediksi Jawa Timur itu akan mengalami kekeringan Pak.

Jadi kekeringan yang lebih, kurang lebih tingkat keparahannya seperti tahun 2019. Jadi saat itu sampai terjadi kebakaran lahan hutan, sampai kekurangan krisis air, akibat adanya, apa? Oh seluruh Jawa Timur, sebagian besar wilayah Jawa Timur.

KETUA RAPAT:

Udah aman, Pak. Seluruh Jawa Timur Bu ya, sebagian besar ya.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Iya, iya.

Bahkan Jawa, sebenarnya ada petanya. Ada yang bawa, bisa ditayangkan dari klimatologi yang kemarin di *press conference* itu mohon ditayangkan.

Kami sudah *press conference* juga, sudah melapor ke Presiden sejak Maret kami melapor, agar ada antisipasi tiga bulan.

Jadi apa, antisipasinya sebenarnya PUPR juga sudah mengantisipasi, mengatur waduk, pintu-pintu air, irigasi, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup jadi berkoordinasi juga dengan kami melakukan apa ini teknologi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk-waduk, bendung-bendung. Ini jadi antisipasi dilakukan, tapi mohon juga diwaspadai jangan sampai ada yang menyulut puntung rokok, karena sangat-sangat mudah terbakar. Kondisinya mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober mulai berkurang, ya Oktober mulai berkurang tapi masih ada potensi. Jadi itu untuk apa Pak Soehartono, mohon maaf informasinya kurang, kurang, beritanya kurang bagus.

Tadi Ibu Cen, Ibu, saya ini merasa berhutang dan berdosa sama Ibu. Sampai mimpi Ibu saya ini, sampai mimpi. Lah malu sudah dua kali, seakan-akan bohong tapi sebenarnya kami ya kami malah terbohongi ya, terbohongi. Tapi karena sudah begitu malunya, kami berupaya Tahun Anggaran 2024 dari APBN itu kami alokasikan untuk Radar di Natuna, dan ini sebetulnya tidak hanya Ibu, karena ini kepentingan negara Bu. Itu NKRI terluar, terdepan dan memang sangat-sangat vital di sana dan bahkan seandainya tadi *Project STR-2* yang MMS-2 itu disetujui secara tertulis, kan sekarang baru lisan, itu langsung akan kami segera nomor satu pengadaan Radar.

Jadi alternatifnya kalau tidak dari pinjaman luar negeri, kalau berhasil, kalau gagal pinjaman luar negeri, 2024 dengan APBN.

Itu, *njeh*.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Pimpinan. Sebentar ya, boleh setengah menit.

Bu Profesor, kalau pakai rupiah murni kira-kira bulan berapa, jangan sudah lewat. Bulan berapa? Oktober 2024. *Nah*, kalau begitu, saya minta mungkin awal-awal dibikin dulu sesuatu entah pokoknya Bu Profesor atur. *Yes, nah*, saya nanti kunjungan ke sana. Siap, oke.

Terima kasih, Bu Profesor.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu, lanjut Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Jadi Ibu, itu.

Kemudian. Oh ada, yang ditayangkan apa ini. Oh kekeringan. Jadi seluruh Jawa, ini petanya, *nah*, dibesarkan. Peta paling kiri atas itu bulan Juni ya Pak Fahri. Juni kan, bulan Juni, jadi yang diwaspadai yang warna coklat, coklatnya semakin menghitam itu keringnya semakin meningkat. *Nah*, dari sini terlihat di bulan Juni ini sudah mulai paling hitam itu Jawa Timur Pak, mohon maaf ini beritanya. Paling hitam itu Jawa Tengah sebagian dan Jawa Timur, sebagian besar Jawa Timur.

Nah kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara, paling hitam di Nusa Tenggara itu Pulau Sumba, beserta di Sumatera Selatan itu coklatnya sudah muncul, sebagian kecil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah mulai *orange* ini mulai kering, lalu Sulawesi Selatan, Pantai Barat sudah mulai kering ini bulan Juni, Papua Selatan ini Pak Willem ini Papua bagian selatan sudah mulai kering.

Nah, lalu peta sebelah tengah itu bulan Juli, kita melihat warna *orange*, coklat, dan hitam semakin meluas ini artinya keringnya semakin meningkat, gambarnya adalah kalau kondisi normal turun hujan, itu hujannya sekitar 30 milimeter untuk satu hari, itu kondisi normal. *Nah*, kondisi ini kurang lebihnya kalau ada hujan, 20 milimeter untuk satu bulan, jadi yang harusnya satu hari itu untuk satu bulan, itu kondisi yang terbasah. Bisa dibayangkan, yang kondisi yang terbasah.

Jadi bisa sampai tidak ada hujan sama sekali, jadi bulan Juli itu hitamnya Jawa Timur itu sekali lagi itu merata sampai gelap ini, masih seluruh Jawa, seluruh Nusa Tenggara, termasuk Maluku itu kena juga. Maluku, eh enggak-mohon maaf. Maluku tidak, *alhamdulillah* Maluku itu malah hijau ini,

malah hijau ini artinya masih hujan. Maluku Tenggara kena, Maluku Tenggara, Maluku Selatan itu kena. Eh Tenggara maaf, Maluku Tenggara itu di bulan Juli. Kemudian juga Sumatera hampir merata, Kalimantan Tim, Barat, Tengah, Selatan, Timur itu kena, kering. Sulawesi semakin meluas. Dan di bulan Agustus ini semakin parah, semakin meluas, di bulan September semakin meluas. Jadi puncaknya Agustus, September puncak keringnya ini.

Nah, kemudian Oktober masih kering, tapi sudah mulai berkurang, tapi masih kering, lebih kering dari saat ini itu dan akhirnya Agustus, itu September ya, September, September ini masih ini coklat dan *orange* dan akhirnya Oktober tersisa di Jawa Timur lagi.

Jadi yang paling lama kena itu Jawa Timur, hampir merata, kemudian Nusa Tenggara masih, Sumatera bagian Selatan, dan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kalimantan itu Kalimantan Selatan. Demikian Pak untuk kering.

Dan ini yang terakhir, dari Bapak Tamanuri, sudah nggak ada, tapi ini kami sampaikan itu terima kasih atas perhatian Bapak, kami akan segera tindak lanjuti persoalan polusi udara ini dan tadi ada kelebihan pembayaran temuan ini harus segera kami selesaikan juga, sedang dalam proses ya. Demikian Bapak.

Oh iya, yang tadi yang secara sah apa tadi, ada satu yang tidak, tidak, tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat ditindaklanjuti secara sah itu karena apa, gugatan dari penyedia melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memenangkan gugatan oleh penyedia terhadap BMKG.

Demikian. Terima kasih. Mohon arahan lanjut Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak, Pak Ketua.

Mohon maaf, izin boleh.

KETUA RAPAT:

Setengah menit boleh Pak ya.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Bu Ketua, eh Bu Kepala. Mohon ditayangkan tadi, yang hitam-hitam di Jawa Timur tadi, negeri kita. Peta. Ini pertanyaan saya begitu memang, jadi harus ada modifikasi cuaca, modifikasi iklim, dan itu di bawah siapa pertanyaan pertama. *Nah*, kalau itu ada di bawah BMKG, di anggaran di mana itu letaknya, itu yang kedua.

Yang ketiga jangan sampai dikurangi, oleh karena itu ber, jadi Ibu memberikanantisipasi kan dan Ibu pasti punya langkah-langkah mitigasi, *nah*, langkah-langkah mitigasi itu harus ada biayanya di sini, harus muncul di sini.

Oleh karena itu saya tanya kepada Bu Kepala, ini anggaran itu ada dimana dan apakah itu tupoksi dari BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca, ya modifikasi cuaca atau hujan buatan lah kasarannya begitu ya. Karena ini pasti harus ada ini, Ibu sudah menyampaikan apa namanya prakiraan, terus antisipasinya bagaimana harus ada jawabannya.

Terima kasih, Pak Ketua Terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Iya, Bu. Silakan, Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih sekali pertanyaan Bapak.

Jadi benar sekali harus ada modifikasi cuaca dan itu dilakukan namun pelaksanaan. Jadi melakukannya sejak bulan apa ya, sudah beberapa bulan. Maret ya, Riau juga ya. Jadi sudah dimulai sejak bulan Maret, *nah*, anggarannya karena ini konteksnya mencegah bencana, jadi dari BNPB, dari BNPB dan Kementerian. Kalau BNPB itu dana *on call* ya dan juga Kementerian Lingkungan Hidup karena untuk mencegah karhutla. Iya untuk mencegah.

KETUA RAPAT:

Bu Kepala, Ibu. Artinya pertanyaan Pak Sigit tadi anggarannya tidak di Ibu?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Tidak.

KETUA RAPAT:

Tidak di Ibu, Pak. Berarti di BNPB?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

BNPB dan/atau KLHK. Betul.

KETUA RAPAT:

Nah, oke. Bagaimana Pak Sigit? Tidak, nggak masuk. Nggak masuk, Bu ya.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Masuk.

KETUA RAPAT:

Nggak, maksudnya penganggaran untuk membuat hujan buatan itu. Ada di Ibu anggarannya?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Ini tupoksi bersama.

KETUA RAPAT:

Tupoksi bersama.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Iya, antara BMKG, KLHK, BRIN.

Karena teknologinya BRIN.

KETUA RAPAT:

Artinya kalau itu tupoksi bersama, anggarannya anggaran bersama? Apa anggarannya di BNPB?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Tidak. Anggarannya di BNPB dan KLHK.

KETUA RAPAT:

Nah, artinya secara teknis pelaksanaannya BNPB kan.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Kami, kami sama BRIN ya, dan TNI karena pesawat. Teknisnya kami bersama BRIN karena *science*-nya, lalu pesawatnya TNI.

KETUA RAPAT:

Kemudian BNPB itu?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

BNPB itu dana, dananya.

KETUA RAPAT:

Oh, penyumbang dana saja maksudnya BNPB. Artinya ini bersama lah ya.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Bersama iya, heeh. Gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Begitu Pak Sigit. Berarti ada tupoksinya. *Nah*, gimana Pak Sigit cukup? Ruwet ya, nanti kita bahas khusus lah, waktu kita membahas anggaran nanti secara detail.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Sekarang saya khawatir Jawa Timur hitam ini nggak tertangani, nih. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena kalau yang hitam itu selain Jawa Timur itu Lampung ya. Lampung itu hitam juga kan. Banyak Pak Sigit, di beberapa Provinsi itu hitam itu.

Nah, artinya begini Bu, itu maksud Pak Sigit dan mungkin teman-teman di sini Ibu Kepala harus berkoordinasi dengan BNPB dan BRIN tadi, bagaimana mengantisipasi membuat hujan buatan tadi di daerah-daerah yang terancam kekeringan. Begitu kan Pak Sigit? *Nah*, nanti detailnya nanti kita bahas Pak Sigit, waktu kita membahas anggaran dengan, dengan Pak Sestama dan Pak Deputi. Gitu ya? Cukup ya Pak Sigit ya?

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Pimpinan, dikit, Pimpinan.

Ini saya *anu* nih, apa namanya bagus nih. Ini kan data yang kemudian menjadi informasi, tetapi kalau nggak ada ditindaklanjuti kebijakan Pemerintah

kan berbahaya bagi rakyat gitu. Data ini sudah dikoordinasikan di Mitra dan dilaporkan ke Pak Presiden ya, Bu ya. Iya, jangan sampai kemudian datanya seperti ini tapi anggarannya nggak ada gitu. Iya-iya, maksud saya anggarannya ada di lintas Mitra itu jangan sampai nggak ada, sia-sia aja gitu loh informasinya akan ada rawan apa namanya kekeringan tetapi apa namanya modifikasi cuacanya nggak ada gitu anggarannya.

KETUA RAPAT:

Cukup ya, cukup. Ibu gimana Ibu silakan teruskan atau cukup. Cukup ya. Baiklah.

Bapak, ibu hadirin-hadirat sekalian,

Apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita bahas maka kita masuk kepada draf kesimpulan. Tolong ditampilkan.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DENGAN
KEPALA BADAN BMKG
KAMIS, 8 JUNI 2023.**

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2022. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI. Seperti kita melihat di sini, Bu. Itu BMKG itu realisasi keuangannya 25,69% realisasi fisik 34,6% artinya itu masih rendah, kita harapkan nanti kedepannya tinggal beberapa bulan akhir tahun ini realisasi itu bisa meningkat.
3. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang Pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 BMKG yaitu seperti kita lihat BMKG itu Pagu indikatifnya sebesar 2,769,700 Triliun tetapi kebutuhannya 3,769,612,696, artinya di sini ada selisih hampir satu triliun ya Bu ya. Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG akan memperjuangkan untuk meningkatkan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional sesuai dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG untuk menyesuaikan program dan kegiatan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Bagaimana Bapak, Ibu Komisi V apakah setuju? Ibu Kepala Badan apakah ada tambahan, masukan. Setuju ya, berarti setuju. Saya ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baiklah.

Bapak, Ibu hadirin-hadirat yang saya hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara pada hari ini ditutup, kami persilakan kepada Ibu Kepala Badan untuk memberikan *closing statement*-nya.

Silakan Bu.

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Bismillah.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI, beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI.

Atas nama keluarga besar BMKG saya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, bimbingan, arahan, masukan yang disampaikan oleh Bapak, Ibu khususnya untuk apa, hasil evaluasi Tahun Anggaran 2023, temuan BPK dan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Serta juga terutama berkat bimbingan, dukungan Bapak, Ibu lah kami sejak tahun 2016 dipercaya untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Tanpa bimbingan Komisi V kami yakin itu akan sulit untuk terwujud.

Terima kasih, mohon maaf bila kami tadi capaiannya, serapannya, saya juga malu ini masih 25% meskipun fisiknya 34% sesuai target, namun kami tetap masih harus bekerja keras untuk memastikan serapan bisa maksimal.

Terima kasih, mohon maaf.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Maka demikian maka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan, Bapak Sestama, dan seluruh jajaran dari BMKG kami ucapkan

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB)

JAKARTA, 8 Juni 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002